

	News Title : Kemendag Minta Biaya Transaksi CPO di Bursa Berjangka Kompetitif Seperti Malaysia	
	Media Name : bisnis.com	Journalist : Dwi Rachmawati
	Publish Date : 30 June 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Isy Karim (Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag), Farid Amir (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Daglu Kemendag)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	Topic : Ekspor CPO

Home • Ekonomi & bisnis • Trade

Kemendag Minta Biaya Transaksi CPO di Bursa Berjangka Kompetitif Seperti Malaysia

Kemendag menginginkan agar nantinya bursa CPO yang ditunjuk oleh pemerintah terpercaya di pasar domestik maupun internasional.

 **Dwi Rachmawati** • Bisnis.com
30 Juni 2023 | 05:54 WIB



Pekerja memanen kelapa sawit saat panen di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Minggu (20/6/2020). Badan Litbang Kementerian ESDM memula kajian kelayakan pemanfaatan minyak nabati murni (crude palm oil/CPO) untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) hingga Desember 2020. Bisnis - Aneel Hermawan?

BAGIKAN



A⁺ A⁻

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan menginginkan agar nantinya biaya transaksi crude palm oil (CPO) di dalam bursa berjangka harus kompetitif atau minimal sama dengan biaya transaksi CPO yang selama ini dilakukan oleh pelaku usaha Indonesia di bursa Malaysia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sekaligus Pih Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Isy Karim.

Menurut Isy, pembentukan bursa berjangka untuk ekspor CPO sudah searah dengan amanah Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diamandemen menjadi UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Seperti diketahui, dalam waktu dekat pemerintah akan membentuk aturan bursa berjangka untuk ekspor produk CPO. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan bank data CPO yang lebih akurat.

"Salah satu tujuan PBK adalah sebagai sarana menciptakan harga (price discovery) dan pembentukan harga acuan (price reference) yang transparan," ujar Isy dikutip dari keterangan resmi. Kamis (29/6/2023).

Adapun Isy menegaskan, nantinya bursa CPO yang ditunjuk oleh pemerintah haruslah terpercaya di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, bursa ekspor CPO juga, kata Isy harus mampu memberikan layanan yang optimal kepada para pelaku usaha.

BACA JUGA

- **Penerimaan Bea dan Cukai Anjlok 15,6 Persen, Terdampak CPO dan Rokok**
- **Pemerintah Naikkan Bea Keluar dan Tarif Pungutan Ekspor CPO**
- **Pemrintaan Turun, Begin Ramadhan Bos Sawit soal Harga CPO**

Adapun dalam implementasinya, Isy menyebut dibutuhkan pelatihan dan sosialisasi terlebih dahulu fwal tata cara serta mekanisme ekspor CPO melalui bursa berjangka kepada para pelaku usaha.

"Diharap, kebijakan yang akan dijalankan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan kontrak jangka panjang (long term contract) dan mudah dalam pelaksanaannya," jelasnya.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Farid Amir menuturkan bahwa kebijakan ekspor melalui bursa berjangka komoditi hanya akan mengatur CPO dengan kode HSI511000. Kebijakan tersebut tidak berlaku untuk produk turunan dari CPO dengan kode tersebut.

Menurut Amir, produk CPO dengan kode HSI511000 dipilih lantaran volumenya tidak terlalu besar sehingga tidak menimbulkan goncangan yang besar saat diimplementasikan.

Socara garis besar, Farid menjelaskan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada alur bisnis kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka.

Hanya saja ada penambahan satu proses sebelum eksportir melakukan ekspor CPO, yaitu harus ditransaksikan di bursa berjangka untuk kemudian diterbitkan bukti pembelian CPO oleh bursa.

Nantinya, bukti pembelian tersebut menjadi dokumen yang akan digunakan dalam pemrosesan Persetujuan Ekspor (PE).

"Phak - phak yang berhak melakukan ekspor adalah Eksportir Terdaftar (ET) dan memiliki Hak Ekspor (HE) yang diperoleh dari pemenuhan atas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) danistau dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO," jelas Farid.